MI
UNAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS DANA ALOKASI DESA DI KABUPATEN BANYUASIN

Diajukan Oleh :
ANDI AMIJAYA
01023120033

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

1/1

S
360.7
Ami
a
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U P T
PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS DANA ALOKASI DESA DI KABUPATEN BANYUASIN

K. 16287
16649

Diajukan Oleh :
ANDI AMIJAYA
01023120033

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	ANDI AMIJAYA
NIM	:	01023120033
JURUSAN	:	EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH	:	EKONOMI KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS DANA ALOKASI DESA (DAD) DI KABUPATEN BANYUASIN

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2008

PEMBIMBING I

Dr. AZWARDI, M.Si
NIP. 132050494

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2008

PEMBIMBING II

Drs.NAZELI ADNAN, M.Si
NIP. 131801648

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS DANA ALOKASI DESA (DAD) DI KABUPATEN BANYUASIN

Diajukan Oleh:

ANDI AMIJAYA
(01023120033)

Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 18 Februari 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Dr. Azwardi, M.Si	Drs. Nazeli Adnan, M.Si	Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050494	NIP. 131801648	NIP. 132050493

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050493

Motto:

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kiranya mereka mengetahui". (Q.S. Al-Ankabut : 41)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al- Insyirah : 6 – 8)

"Jangan pernah berharap untuk menjadi taman bunga yang menyejukkan setiap orang yang melihatnya apabila kau tidak bisa menjadi rumput liar yang mengantarkan dahaga pengembara ke mata air " (_ & A2j)

Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang tuaku
- Saudara-saudaraku
- Nenekku (Almh)
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

Abstract

This research has title " Analyze of Village Fund in Banyuasin Region". The objective is to know and analyze the factors that influence distribution of DAD and influence of DAD to poor people in Banyuasin Region. Data which is used in this research comes from related departement that are Statistical center committee South Sumatra Province, Center committee of villagers and social welfare in Banyuasin Region, and primer data is get by direct interview with research correspondent who are choosen village officer as samples with prepared question. The theory in this research government policy theory and poverty theory. Qualitatively analytical technics used here is to see the mechanism used by local government and the problem faced in distributing village fund especially in Mulya Agung village and Seterio village in Banyuasin III Region as sample to know factors which influence distribution of village fund where as quantitatively by using elasticity to see influence of village fund to poor people in Banyuasin Region. Result of it is village fund has little influence to decrease level of poor people in Banyuasin Region.

Keywords : village fund, poor people, goverment policy, poverty

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir dalam perkuliahan sebagai insan akademis guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam skripsi yang berjudul Analisis Dana Alokasi Desa di Kabupaten Banyuasin

Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendistribusian Dana Alokasi Desa dan bagaimana pengaruh Dana Alokasi Desa terhadap penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pendistribusian Dana Alokasi Desa di Kabupaten Banyuasin dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah setempat dalam upaya mencapai tujuan dari pencanangan program tersebut namun Program Dana Alokasi Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat kecil pengaruhnya terhadap penurunan tingkat penduduk miskin di daerah tersebut. (Elastisitas < 1)

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menambah literatur dan bahan kajian ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan daerah dan juga sekaligus dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin atau pihak-pihak yang terkait dalam pencanangan program-program bantuan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini program Dana Alokasi Desa (DAD).

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena kritik dan saran yang yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga akan dinilai ibadah oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan untuk menghaturkan rasa syukur yang teramat dalam atas kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan KaruniaNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari peranan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada lembar berikut ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menciptakanku dan Nabi Besar Muhammad SAW
2. Ibu Prof. DR. Hj. Badia Parizade, MBA
3. Bapak DR.H. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak DR. Azwardi M.Si selaku pembimbing skripsi I
5. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si selaku pembimbing skripsi II
6. Ibu Dra. Hj. Roswita AB dan Ibu Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si selaku pembimbing akademik
7. Bapak DR. Taufiq Marwa, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Segenap karyawan Badan Pusat Statistik dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyuasin
10. Segenap Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Mulya Agung dan Seterio Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
11. Mama dan Papa tercinta
12. Saudaraku tercinta M. Faryandra dan Rismalawati
13. Nenekku Hj. Siti Maimunah [Almh] dan Hj. Syarifah
14. Yang kukasihi Ria Handarini PN
15. Halem cangkang, Diaz goyie, Ista godek [I'll be mizz u guys]
16. Seluruh anak Ekonomi Pembangunan, Kak Mukhlis, Boby Malpar, Sekip Camp Community [SCC]: Indra sena [mokasih om], Hendra, Norman, Agus, Joni n Adam [Sabaar jok], Fakhrianuddin, S.Pd selaku editor, Kak Iwan, Unto, Tujah, Wak Syamsul, M. Isa atas bantuan data n akomodasinya, Todes, Boris n Sitol, Albeli, Fifin, Anggamo, Astariza "mama", Ajib, Beni, Habib, Azhari,

Ical, Lia, Aning, Asma, Norma, Lian, Dora, Dian, Aji, Aang, Naldo, dan yang tak bisa disebutkan satu- persatu

17. Keluarga mahasiswa FE, HIMEPA, BEM FE Unsri 2006-2007, Adek-adekku di BEM {Lia diet, Nia joyok, Ria bankox, Ellen, Cha-cha, Niken, Uti, Khairil, Sarman, Isni}, Jenggot, Yozar, SalamBrie, Ivi, Wiwin, Brit, Vilda, Deby Co, Mince, Eka, Yendut, Temex, Dindut, Jupe dan teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keikhlasannya.
18. Keluarga Besar Gemapala "WIGWAM" FH Unsri, Sangkar Burung Hantu yang turut membesarkanku, Sutrisman, Kusmiran, Dhaby, Anto, M. Erwin, Fadli, Anca, Jimmy, Anhar, Ucok gultom, Fadjri, Ardi colee, Angga, Daniel, Qumar, Fahmi, yuk Herlina atas bantuan data n *tour the balai*nya, Dewi, Tojoy, Bujel, Tika [thank's bik], Anes, Rio keparat [bepikir nang], Ando, Irwan ngkong, Emon, Sur, Herly, Wak Febri atas pijat refleksi dan transportasinya, Yudha, Yogi, Ginjut [yang rajin de'] dan adek-adek junior yang lain tetap tegakkan "WIGWAM" dalam kondisi apapun.
19. Kel. Soedijono dan Ibu Sri [Almh], Kel. I.K. Chandra, Kel. Halim Maulana, Kel. Yanusri, Kel. Basuki, Kel. Usman Ali H, Kel. Om Ary n Tante Yeni, Kel. Ahmad Zailani
20. Teman lawas, Ari penyu, Lek jon, Alay, Hendra, Yoyo, Supri,Bom-bom,Defri
21. Pak Umar Hamdan, Pak Tanzil, K' Warindi, K' Adi, Yuk Ita, Yuk Semi, Bu Santi, Yuk Aslawati, K'Mul, K'Udin, K'Amir, Yuk Adis, Yuk her, K' Yazid, K'Nur, K'Aidil, K' Slamet, Pak Sayuti, K'Yitno, Ibu kantin
22. Virgiawan Listianto, Mayang, Putri, Iva farkhanah, Kgs.fansuri, Nokia 2100, Bleki supra x, ZTE, *My yellow cat*, tom, nabil, mamang tukang out bound, Caver, Ayah n emak Anton Dempo, Pencinta alam Indonesia dan *sweet human who full fill my boring day.*

Palembang, 18 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAKSI v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080169
TANGGAL : 06 MAR 2008

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian 1
1.2. Perumusan Masalah 12
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Manfaat Penelitian 12
1.5. Metodologi Penelitian 13
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 13
1.5.2. Jenis Data dan Sumber Data 13
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data 13
1.5.4. Teknik Pengambilan Sampel 14
1.5.5. Teknik Analisis 15
1.5.6. Batasan Variabel Operasional 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 19
2.1.1. Teori Kebijakan Pemerintah 19
2.1.2. Teori Kemiskinan 23

2.2. Penelitian Terdahulu 34

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

3.1. Kondisi umum wilayah, Administrasi dan Pemerintahan 39
3.2. Kependudukan 40
3.2.1. Keadaan Penduduk 40
3.2.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 40
3.2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk 40

3.3. Keadaan Perekonomian Kabupaten Banyuasin 43
3.3.1. Produk Domestik Regional Bruto 43

3.4. Gambaran Umum Variabel Penelitian 46
3.4.1. Perkembangan Dana Alokasi Desa di Kabupaten Banyuasin 46
3.4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuasin 51

3.5. Identitas Responden Penerima Bantuan Dana Alokasi Desa 53
3.5.1. Responden Desa Seterio dan Desa Mulya Agung Menurut Tingkat Pendidikan dan KelompokUmur 54
3.5.2. Responden menurut Pengetahuan akan DAD dan Partisipasinya dalam penentuan DAD bagi desa 55
3.5.3. Responden menurut Tingkat Penghasilan dan Pengeluaran Rumah Tangga dalam satu bulan 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor- Faktor yang mempengaruhi pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Banyuasin 59
4.1.1. Mekanisme Pendistribusian Dana Alokasi Desa 59
4.1.2. Faktor –Faktor Penghambat Pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Banyuasin 61

4.2. Pengaruh Dana Alokasi Desa Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuasin 65
4.2.1. Elastisitas Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuasin 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 69

5.2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1.	Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Daerah dan Rata-rata Penduduk per Km^2 Menurut Kecamatan.....	42
3.2.	PDRB Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah).....	44
3.3.	PDRB Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta Rupiah).....	45
3.4.	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyuasin tahun 2005.....	52
3.5.	Responden Menurut Pendidikan Terakhir dan Kelompok Umur....	54
3.6.	Responden menurut Pengetahuan akan DAD dan Partisipasinya dalam Penentuan DAD bagi desa.....	55
3.7.	Responden menurut Tingkat Penghasilan dan Pengeluaran Rumah Tangga dalam satu bulan.....	56
4.1.	Total Dana Alokasi Desa yang diterima oleh Desa Mulya Agung dan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.....	59
4.2.	Pengetahuan Masyarakat Desa Mengenai Peruntukkan Dana Alokasi Desa.....	61
4.3.	Pengetahuan Masyarakat Desa Mengenai Jumlah Dana Alokasi Desa Yang Diperoleh Desa	62

4.4. Manfaat Dana Alokasi Desa Bagi Profesi Masyarakat Desa..... 63

4.5. Perkembangan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Gubernur di Kabupaten Banyuasin Tahun 2004 -2007..... 64

4.6. Persentase Peningkatan Dana Alokasi Desa dan Penduduk Miskin... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse..... 24

2.2. Model Implementasi Grindle..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam kewenangan daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daerahnya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan kegiatannya, pemerintah daerah memerlukan dana demi melaksanakan pembangunan daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sesuai untuk membangun suatu daerah.

Otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu wacana otonomi daerah mengemuka dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap Undang - Undang Dasar 1945 yang di dalamnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Secara lebih khusus lagi, inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Mardiasmo; 2002: V).

Semakin luas otonomi yang diberikan dan diterima baik oleh suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja juga makin besar biaya penyelenggaraannya. Itu sebabnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyertai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di mana Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengatur pajak-pajak apa saja yang mulai harus dilimpahkan kepada daerah baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya serta diatur pelimpahan dan pembagian hasil pemungutan pajak tertentu.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana perimbangan.
c. Pinjaman daerah.
d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah.

b. Hasil retribusi daerah.

c Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sumber keuangan inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah, karena sumber-sumber keuangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam otonomi daerah dan juga menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya keuangan disamping mengefektifkan dan mengintensifkan sumber yang telah ada tersebut ataupun dengan menggali potensi keuangan daerah, sehingga dapat menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu memberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.

Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemberian kebijakan otonomi dilakukan pada saat belum optimalnya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tampak pada kebijakan pemerintah daerah yang belum terarah dan tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten atau kotamadya lainnya. Di bidang keuangan, pemerintah daerah dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana, mengingat dana yang diperoleh dari pemerintah pusat kurang dari cukup atau terbatas, sedangkan dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk pembangunannya.

Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Direktorat Jendral Otonomi daerah : 2000)

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten / kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia : 2004 ; 126)

Berdasarkan UU.No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa).

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pendapatan asli desa meliputi, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (PP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan Keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Upaya untuk memacu pembangunan daerah di segala sektor diperlukan kerja keras aparat pemerintahannya. Selaku kepala daerah, khususnya kabupaten, bupati harus mengetahui semua permasalahan yang terjadi di wilayah pemerintahannya, termasuk keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Untuk mengetahui semua itu, tidak hanya dengan menerima laporan, melainkan perlu melakukan peninjauan langsung ke lapangan, hingga ke daerah terpencil sekalipun.

Selain menghadapi masalah keuangan dan kebijakan pembangunan yang masih bersifat sektoral, nampak masih banyak kabupaten yang mengabaikan dukungan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi desa, yaitu PP No.76 tahun 2001 yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi (Biro Peraturan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat : 2001)

Sesuai dengan tugas bupati dan jajarannya, dengan jarak tinjau ke wilayah desa dan kecamatan yang saat ini hanya memakan waktu paling lama dua jam, tidak mungkin pemerintah kabupaten tidak tahu kondisi pembangunan di daerah-daerahnya. Tolok ukurnya ada pada tugas dan fungsi masing-masing instansi yang

diberikan tanggung jawab, sehingga komitmen dengan kepentingan rakyat sangat penting. Dengan kata lain tidak mungkin untuk tidak mengetahui kondisi pembangunan di wilayahnya sesuai dengan peranannya yaitu tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Rakyat menginginkan perhatian pembangunan untuk kesejahteraan mereka, karena rakyat akan menilai dan dapat mengetahui semua apa yang diperbuat pemerintah bagi mereka. Untuk mengatasi hal itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dahulu ada program-program bantuan desa, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedangkan saat ini ada program semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Namun sering kali ditemui program-program tersebut mengalami hambatan. Kalaupun menyentuh masyarakat, program-program tersebut banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep. Selain itu memang banyak program yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Program Pemberdayaan Desa / Kelurahan terarah pada 2 (dua) jenis kegiatan yang meliputi :

1. Bantuan Operasional Pemerintahan Desa / Kelurahan

   Kegiatan ini merupakan bantuan langsung untuk seluruh Desa / Kelurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan. Bantuan ini digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk kegiatan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kepemudaan, Statistik Desa/Kelurahan serta biaya operasional pemerintahan desa / kelurahan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.

   Kegiatan ini merupakan bantuan langsung untuk pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dengan fokus kegiatan pembangunan fisik prasarana maupun ekonomi produktif dan juga digunakan untuk biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan biaya operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan. (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial ; 2007 : 2)

Adapun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan , meliputi:

1. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana (jalan, saluran irigasi pertanian, jembatan, gorong-gorong, pasar desa/ kelurahan dan lain-lain) yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas.
2. Kegiatan ekonomi produktif yang mengarah pada peranan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan sesuai kondisi dan potensi yang ada. (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial ; 2007 : 2)

Dalam pembangunan dikenal 3 (tiga) jenis paradigma pembangunan yaitu paradigma pembangunan yang berfokus pada pemerataan, paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan, dan paradigma pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat. (Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa; 2006 : 4).

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pemerataan adalah yang menjadikan pemerataan hasil – hasil pembangunan sebagai *issue* sentral dalam pembangunan. Kesejahteraan rakyat yang merata menjadi keinginan yang didahulukan.

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan adalah paradigma yang menjadikan pertumbuhan sebagai *issue* sentral dalam pembangunan. Paradigma ini mengharapkan perolehan devisa negara yang tinggi, namun kurang memperhatikan kondisi kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat adalah paradigma yang menjanjikan rakyat sebagai pusat pembangunan, baik dalam konstruksi konsep dan praktek pembangunan, yang menyetarakan kehendak dan kreativitas rakyat, yang mengembangkan kemampuan rakyat, dan yang mempertimbangkan penilaian terhadap hasil – hasil pembangunan.

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud menurut UU No. 32 tahun 2004 Pasal 215 (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan:

a. Kepentingan masyarakat desa

b. Kewenangan desa

c. Kelancaran pelaksanaan investasi

d. Kelestarian lingkungan hidup

e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Dalam memotivasi kesungguhan kabupaten membangun daerah, Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman memberikan kiat bagi daerahnya "janganlah kita berkeringat karena dibuat, melainkan kita berkeringat memang berlari". Keberpihakan pemerintah Sumatera Selatan dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan terhadap kepentingan pembangunan desa dan kelurahan dijabarkan melalui kebijakannya menganggarkan dana Pembangunan Desa dan kelurahan melalui APBD provinsi sebesar Rp. 15 juta per tahun. (Suara Karya ; 2006: 4)

Dalam APBD Desa tercakup menyangkut anggaran kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebesar Rp 2 juta, Karang Taruna sebanyak Rp.500 ribu, serta anggaran untuk petugas pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan dana bantuan untuk pembangunan usaha produktif. Gubernur dalam setiap kunjungan kerjanya ke desa-desa selalu memberikan bantuan material sesuai dengan yang dibutuhkan desa dan kelurahan.

Dalam memberikan bantuan, Gubernur selaku kepala daerah selalu mengingatkan para kepala desa dan lurah di kecamatan yang dikunjunginya agar bantuan baik dalam bentuk dana maupun material betul-betul disampaikan kepada sektor yang tepat peruntukannya jangan sampai terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. (Suara Karya ; 2006 : 5)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) yaitu mekanisme yang digunakan dalam rangka pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau kabupaten dan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pendistribusiannya atau yang menyebabkan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam menciptakan pemerintahan desa yang maju dan mandiri (*self governing community).*

Meskipun desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, kebanyakan desa menghadapi masalah yang akut. *Pertama*; desa memiliki APB Desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua;* kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang tinggi. *Ketiga;* Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat;* tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mendulang kritikan di mana banyak yang tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap penduduk miskin dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusiannya dalam penelitian berjudul **Analisis Dana Alokasi Desa di Kabupaten Banyuasin.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin.
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Banyuasin.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Banyuasin.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambah literatur dan bahan kajian ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin atau pihak-pihak yang terkait dalam pencanangan program-program bantuan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini program Dana Alokasi Desa (DAD).

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin dengan menganalisis permasalahan pengaruh Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap penduduk miskin dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusiannya antara lain yaitu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah setempat dan hambatan yang dihadapi dalam pendistribusian Dana Alokasi Desa (DAD) tersebut khususnya di Desa Mulya Agung dan Desa Seterio Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin.

1.5.2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalm penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden penelitian yaitu perangkat desa dan masyarakat desa yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data skunder didapatkan dari lembaga-lembaga dan intansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (BPMD dan Kesos) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuasin.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu :

1. Penggunaan data primer, data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan sampel responden. Untuk keperluan tersebut

dipergunakan pertanyaan (questioner) sebagai pedoman atau panduan, data yang telah di kumpulkan dari responden selanjutnya akan diolah

2. Penggunaan data skunder, data ini dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan berdasarkan laporan-laporan, makalah, jurnal maupun buku-buku dari instansi-instansi seperti Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkaitan dengan data Dana Alokasi Desa (DAD) dan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (BPMD dan Kesos), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuasin serta litelatur yang relevan dengan penelitian ini.
3. Observasi, data ini diperoleh melalui pengamatan secara langsung mengenai daerah penelitian, objek yang diteliti tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah sampel dan lain sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengambilan Sampel

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahawa responden dalam penelitian ini adalah bertempat tinggal di Desa Seterio dan Desa Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III. Penulis mengambil sampel penelitian sebanyak 30 responden pada setiap desa penerima bantuan dana Aloksi desa (DAD). Total responden yaitu sebanyak 60 responden. Dipilihnya kedua desa ini secara *purposive* dengan pertimbangan di mana pada kedua desa tersebut secara geografis dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin sehingga akan mempermudah akses dalam pengambilan data penelitian, terdapat banyak

penduduk yang masih miskin dan pernah memperoleh bantuan Dana Alokasi desa (DAD) dan juga masing-masing desa memiliki komoditi unggulan yang berbeda sebagai aspek penting dalam pembangunan suatu desa. Responden dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala desa dan warga masyarakat desa yang masih miskin dan pernah memperoleh bantuan Dana Alokasi Desa (DAD).

1.5.5. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan berbagai data yang diperlukan dalam bentuk tabel serta menjelaskan berdasarkan teori – teori yang relevan guna memecahkan permasalahan yang ada baik dalam bentuk angka mutlak maupun relatif (persentase). Teknik analisis kuantitatif yaitu analisis dengan menggunakan peralatan matematis, yaitu dengan mengukur elastisitas antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Elastisitas} = \mu = \epsilon = E$$

Elastisitas = jika $\mu < 1$ maka elastisitas antara variabel x dan y adalah inelastis

jika $\mu > 1$ maka elastisitas antara variabel x dan y adalah elastis

jika $\mu = 1$ maka elastisitas antara variabel x dan y adalah uniter elastis .

Elastisitas menggambarkan hubungan antara kedua variabel x dan y, dalam hal ini Dana Alokasi Desa (DAD) sebagai variabel x dan tingkat penduduk miskin (RTM) sebagai variabel y dengan melihat pengaruh dari setiap penambahan variabel Dana Alokasi Desa (DAD) terhadap perubahan tingkat penduduk miskin (RTM).

$$\mu = \frac{\%\Delta \text{RT Miskin}}{\%\Delta \text{DAD}}$$

$$\frac{\dfrac{RTM^2 - RTM^1}{RTM^1} \times 100}{\dfrac{DAD^2 - DAD^1}{DAD^1} \times 100}$$

$$\frac{\dfrac{\Delta RTM}{RTM}}{\dfrac{\Delta DAD}{DAD}}$$

$$\frac{\Delta RTM}{RTM} \times \frac{DAD}{\Delta DAD}$$

$$\mu = \frac{\Delta RTM}{\Delta DAD} \times \frac{DAD}{RTM}$$

Keterangan :

	%Δ RT Miskin	=	Persentase Perubahan Penduduk Miskin
	%Δ DAD	=	Persentase Perubahan Dana Alokasi Desa
	μ	=	Elastisitas
	RTM^2	=	Jumlah Rumah tangga miskin tahun tertentu
	RTM^1	=	Jumlah Rumah tangga miskin tahun tertentu
	DAD^2	=	Jumlah DAD tahun tertentu
	DAD^1	=	Jumlah DAD tahun sebelumnya

dimana :

Jika $\eta < 1$: Inelastis yaitu besarnya % perubahan DAD > besarnya % perubahan RTM

Jika $\eta > 1$: Elastis yaitu besarnya % perubahan DAD < besarnya % perubahan RTM

Jika $\eta = 1$: Uniter elastis yaitu besarnya % perubahan DAD = besarnya % perubahan RTM

1.5.6. Batasan Variabel Operasional

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Alokasi Desa (DAD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
4. Sumber pendapatan desa antara lain :
   a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)
   b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
   c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota.

d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

5. Jumlah penduduk miskin (RTM) adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yakni batas pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin, *Banyuasin Dalam Angka, 2005-2006*

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, *Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Selatan, 2005.*

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (BPMD dan Kesos) Kabupaten Banyuasin *Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Desa Kabupaten Banyuasin, 2007.*

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (BPMD dan Kesos) Kabupaten Banyuasin *Penetapan Besarnya Dana Alokasi Desa(DAD) Bagi Masing-Masing Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, 2004-2007.*

Brata, A. G. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan.* Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Casmidi dan Catur Siagian, 2005. Formula Dana Alokasi Desa : Kasus Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah , Jurnal

Kompas, Basri, Muhammad, 30 Maret, 2007: *Desa dan Kemiskinannya*, Artikel

Kuncoro, Mudrajat, 2003, Ekonomi Pembangunan : *Teori, Masalah dan Kebijakan.* Edisi ketiga. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, edisi I, 2002, ANDI: Yogyakarta

Maulana, Halim. 2007. *Analisis Investasi Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Selatan*, Skripsi

Mukhlis. 2007. *Efektivitas Implementasi Program Dana Bantuan Desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Tahun 2005 (Studi Kasus Desa Suka Negara, Desa Senabing dan Desa Tanjung Payang)*, Tesis

Musgrave, Richard A dan Musgrave Peggy B. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Erlangga: Jakarta

Natsir, Irwan, 14 Juni, 2007, *Efektivitas Pembangunan Daerah*, Pikiran Rakyat

Rachbini, Didik J.1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan*, Bina Rena Pariwara : Jakarta

Ruliansyah, Ahmad. 2007, *Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi.

Sahdan, Gregorius. 2007, *Menanggulangi Kemiskinan Desa,* Artikel

Sukirno, Sadono.2000, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Suara Karya, 6 November , 2006. *Pemrov Sumatera Selatan Berjibaku Perangi Kemiskinan Berlari Mengejar Ketertinggalan"*, liputan khusus.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005.*Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama: Jakarta

Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.

Undang - Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. PT. Arkola: Surabaya

Undang - Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. PT. Arkola: Surabaya

Wibawa, Samudra dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Wikipedia Indonesia. 2007. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* Wikipedia Foundation, Inc.

Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPress: Yogyakarta